

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi katalisator perubahan dalam tata kelola organisasi pemerintahan di Indonesia. Seiring dengan penerapan pada e-government yang semakin masif, instansi pemerintah dituntut untuk meningkatkan kapabilitas teknologi informasi (TI) dalam mendukung pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu lembaga pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan pengaturan tenaga kerja juga menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan TI.

Sejauh ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan telah Menerapkan berbagai sistem informasi untuk mendukung operasional harian seperti sistem informasi penempatan kerja, sistem pengelolaan data transmigrasi, dan sistem penerbitan izin kerja. Namun, Penerapan sistem-sistem tersebut belum disertai dengan evaluasi mendalam tentang kematangan tata kelola TI yang dapat menjamin bahwa investasi TI benar-benar memberikan nilai optimal bagi organisasi dan pemangku kepentingannya. Kesenjangan ini berpotensi menyebabkan efisiensi sumber daya, ketidaksielarasan antara strategi bisnis dan TI, serta risiko keamanan informasi yang belum termitigasi dengan baik. Tata kelola TI yang baik menjadi kebutuhan mendesak, mengingat meningkatnya ketergantungan terhadap layanan digital dan ekspektasi masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintah. Permasalahan yang sering muncul dalam Penerapan TI di instansi pemerintah termasuk kurangnya standarisasi proses, inkonsistensi dalam pengelolaan sumber daya TI, serta belum optimalnya pengukuran performa dan kontrol

terhadap proses TI. Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, beberapa indikasi masalah serupa telah teridentifikasi, seperti belum adanya dokumentasi prosedur operasional standar yang komprehensif, keterbatasan kompetensi SDM bidang TI, serta belum optimalnya pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja sistem informasi yang ada.

COBIT (*Control Objectives for Information and Related Technology*) 2019 sebagai kerangka kerja tata kelola TI internasional menawarkan pendekatan komprehensif yang dapat digunakan untuk mengukur dan meningkatkan tingkat kematangan tata kelola TI. Berbeda dengan versi sebelumnya, COBIT 2019 memberikan fleksibilitas lebih tinggi dengan pendekatan yang lebih adaptif sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik spesifik organisasi. Pendekatan ini sangat relevan untuk diterapkan pada instansi pemerintah yang memiliki keunikan tantangan dan kebutuhan dalam mengadopsi teknologi informasi.

Penilaian tingkat kematangan tata kelola TI menggunakan COBIT 2019 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan menjadi penting untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi aktual dengan praktik terbaik yang direkomendasikan. Melalui penilaian ini, dapat diketahui aspek-aspek yang perlu ditingkatkan prioritasnya untuk mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi. Hal ini akan membantu pengambil kebijakan dalam menyusun strategi pengembangan TI yang lebih terarah dan berorientasi pada pengoptimalan nilai. Selain itu, penerapan COBIT 2019 juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE. Kedua regulasi tersebut menekankan pentingnya penerapan tata kelola TI yang terstandarisasi untuk memastikan layanan publik yang lebih responsif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

signifikan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan kapabilitas tata kelola TI sehingga dapat mempercepat transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan publik. Lebih jauh, hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi instansi pemerintah daerah lainnya yang memiliki karakteristik serupa dalam mengembangkan tata kelola TI yang efektif dan terukur.

Sebagai framework, COBIT 2019 (*Control Objectives for Information and Related Technology*) memiliki lima domain utama. Domain utama dari COBIT 2019 mencakup berbagai aspek pengelolaan dan pemantauan teknologi informasi. Kelima domain COBIT (*Control Objectives for Information and Related Technology*) 2019 ini dirancang untuk memberikan panduan yang secara keseluruhan dan terpadu dalam menghadapi tantangan untuk organisasi dalam mengelola aset IT.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat saat ini menuntut instansi pemerintah, termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, untuk mengelola aset TI secara efektif, efisien, dan terukur. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak internal yaitu Kepala Bidang Perencanaan dan IT Pada Disnakertrans Provinsi Sumsel, diketahui bahwa terdapat kebutuhan untuk meningkatkan tata kelola aset teknologi informasi, khususnya dalam hal pemeliharaan, pengadaan, penggunaan, serta optimalisasi aset yang telah dimiliki., Yaitu **BAI09 (Manage Assets)** Dikarenakan Domain tersebut memiliki angka kritis paling tertinggi yaitu di angka (50%).

Hal ini sejalan dengan domain **BAI09 (Manage Assets)** pada kerangka kerja COBIT 2019 yang mencakup aktivitas perencanaan, pemantauan, dan pengelolaan aset TI agar dapat mendukung tujuan layanan dan proses bisnis organisasi secara berkelanjutan. Penerapan domain ini dirasa penting untuk mendorong efisiensi biaya operasional, meningkatkan nilai aset, serta mengurangi risiko kehilangan atau penyalahgunaan aset TI. Melalui hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa pengelolaan aset TI saat ini belum

sepenuhnya terdokumentasi dan terintegrasi dalam satu sistem yang konsisten. Selain itu, evaluasi terhadap aset lama, pemanfaatan lisensi perangkat lunak, dan kebijakan penghapusan aset masih dilakukan secara manual dan belum berbasis kebijakan yang terstandarisasi. Hal inilah yang mendorong pentingnya penerapan prinsip-prinsip COBIT 2019 untuk memperkuat tata kelola TI yang ada.

BAI09 (Managed Assets) menjadi prioritas utama untuk penerapan COBIT 2019 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera Selatan karena peran pentingnya dalam memastikan pengelolaan aset teknologi informasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam konteks instansi pemerintah seperti Disnakertrans, aset TI mencakup perangkat keras, perangkat lunak, lisensi, data, dan infrastruktur digital yang digunakan untuk memberikan layanan publik. Ketidaktertiban dalam pengelolaan aset ini dapat menyebabkan pemborosan anggaran, ketidakefisienan layanan, hingga risiko kehilangan data penting.

Penerapan BAI09 memungkinkan adanya identifikasi dan pencatatan seluruh aset TI yang dimiliki dengan akurat, sehingga pengawasan dan pelaporannya menjadi lebih transparan. Hal ini mendukung akuntabilitas yang menjadi prinsip utama dalam tata kelola sektor publik. Selain itu, melalui pengelolaan aset yang baik, perencanaan pemeliharaan dan penggantian aset dapat dilakukan secara tepat waktu, yang pada akhirnya membantu menjaga kinerja layanan teknologi dan menghindari downtime yang menghambat operasional dinas.

Dalam era transformasi digital, keberhasilan pengelolaan aset TI juga berdampak langsung terhadap kapasitas instansi dalam mengadopsi sistem layanan berbasis elektronik, seperti sistem informasi ketenagakerjaan, pelatihan, dan transmigrasi. BAI09 memperkuat pondasi digital dengan menjamin bahwa seluruh komponen yang mendukung digitalisasi tersebut dalam kondisi optimal dan tercatat secara sistematis. Selain itu, aset yang dikelola dengan baik juga mempermudah proses audit dan penilaian kepatuhan terhadap regulasi,

termasuk dalam aspek keamanan dan perlindungan data. Karena itu, memprioritaskan BAI09 memberikan dampak strategis jangka panjang, membantu Disnakertrans membangun sistem informasi yang lebih andal, mendukung efisiensi anggaran, serta memperkuat tata kelola dan transparansi dalam pelayanan publik. Dalam laporan COBIT yang ditelaah, BAI09 termasuk dalam area dengan nilai perhatian tinggi, menunjukkan perlunya peningkatan segera untuk mencapai kinerja dan kapabilitas tata kelola yang lebih baik.

Dari hasil Pengukuran Desain Toolkit Domain COBIT 2019 yang telah dilakukan oleh peneliti pada Maret 2025 didapatkan nya Domain **BAI09 (Manage Assets)** yang dimana memiliki nilai angka kritis paling tinggi yaitu Mencapai Lebih dari 50% , Berikut penjelasan mengenai tabel tabel Design Factor (Toolkit) COBIT 2019 :

A. Penjelasan Hasil Design Factor – Enterprise Energy 01

Hasil analisis Design Factor 1 menunjukkan arah strategi perusahaan dalam menentukan prioritas arsitektur bisnis. Berdasarkan penilaian, terdapat empat kategori strategi yang dinilai tingkat kepentingannya.

Pertama, **Growth/Acquisition** memperoleh skor empat, lebih tinggi daripada baseline tiga. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi memiliki orientasi yang kuat terhadap pertumbuhan bisnis, baik melalui ekspansi, akuisisi, maupun pengembangan pasar. Dengan demikian, strategi perusahaan menekankan pada peningkatan skala usaha dan memperluas jangkauan kompetitif.

Kedua, **Innovation/Differentiation** juga memperoleh skor empat, di atas baseline tiga. Kondisi ini mengindikasikan bahwa inovasi dan diferensiasi menjadi bagian penting dari strategi organisasi. Perusahaan berupaya menciptakan nilai tambah melalui produk, layanan, atau pendekatan bisnis yang unik untuk membedakan diri dari pesaing. Fokus pada inovasi ini selaras dengan upaya mempertahankan daya saing jangka panjang.

Ketiga, **Cost Leadership** hanya memperoleh skor tiga, yang sama dengan baseline. Hal ini berarti efisiensi biaya memang diperhatikan, namun bukan

merupakan strategi dominan dalam organisasi. Perusahaan tetap menjaga efektivitas biaya, tetapi tidak menjadikannya pendorong utama dalam mencapai tujuan bisnis.

Keempat, **Client Service/Stability** juga mendapat skor tiga, setara dengan baseline. Ini menunjukkan bahwa stabilitas operasional dan layanan kepada pelanggan tetap dianggap penting, tetapi tidak menjadi penekanan strategis utama dibandingkan dengan pertumbuhan dan inovasi.

Secara keseluruhan, hasil Design Factor 1 menegaskan bahwa organisasi memiliki orientasi strategis yang berfokus pada **pertumbuhan dan inovasi**. Aspek efisiensi biaya dan stabilitas layanan tetap diperhatikan, tetapi lebih sebagai faktor pendukung. Dengan demikian, tata kelola dan sistem teknologi informasi yang akan dikembangkan perlu diarahkan untuk mendukung ekspansi bisnis, mendukung inovasi, serta menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

B. Penjelasan Hasil Design Factor Enterprise Goals - 02

Hasil analisis Design Factor 2 menunjukkan bahwa organisasi memberikan perhatian yang berbeda terhadap berbagai tujuan strategis perusahaan. Prioritas tertinggi terlihat pada **optimisasi biaya proses bisnis (EG09)** dengan skor lima, jauh di atas baseline. Hal ini menandakan bahwa efisiensi biaya menjadi fokus utama untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis.

Selain itu, beberapa tujuan lain juga dinilai sangat penting dengan skor empat, yaitu penyediaan portofolio produk dan layanan yang kompetitif (EG01), kualitas informasi keuangan (EG04), kualitas informasi manajerial (EG07), serta kompetensi pimpinan eksekutif (EG12). Keseluruhan faktor ini menggambarkan bahwa organisasi ingin unggul di pasar melalui produk yang kuat, didukung data keuangan dan manajerial yang akurat, serta kepemimpinan yang kompeten.

Di sisi lain, sejumlah tujuan dinilai cukup penting dengan skor tiga, seperti kepatuhan terhadap regulasi eksternal (EG03), budaya layanan yang berorientasi pelanggan (EG05), optimalisasi fungsi proses bisnis (EG08), kepatuhan terhadap

kebijakan internal (EG11), dan inovasi produk atau bisnis (EG13). Tujuan-tujuan ini tetap diperhatikan, namun tidak menjadi prioritas utama organisasi.

Ada beberapa tujuan yang mendapat skor rendah dibanding baseline. Manajemen risiko bisnis (EG02) serta kontinuitas dan ketersediaan informasi (EG06) hanya diberi nilai dua, padahal baseline menunjukkan keduanya biasanya lebih tinggi. Hal ini berarti organisasi tidak terlalu menekankan aspek risiko maupun ketahanan informasi. Selain itu, pengembangan keterampilan, motivasi, dan produktivitas staf (EG10) juga dipandang kurang prioritas.

Secara keseluruhan, arah strategis organisasi berfokus pada efisiensi biaya, daya saing produk, kualitas informasi, dan kepemimpinan. Sementara itu, aspek risiko, ketahanan informasi, serta pengembangan sumber daya manusia kurang mendapatkan perhatian. Dengan demikian, sistem tata kelola TI yang dirancang perlu diarahkan untuk mendukung pengendalian biaya, penyediaan informasi yang berkualitas, serta pengambilan keputusan strategis oleh manajemen puncak.

C. Penjelasan Hasil Design Factor Risk Profile -03

Analisis Design Factor 3 bertujuan untuk memahami profil risiko yang dihadapi organisasi dalam konteks pengelolaan teknologi informasi dan tata kelola perusahaan. Penilaian dilakukan terhadap berbagai skenario risiko berdasarkan dua dimensi, yaitu tingkat dampak (impact) dan tingkat kemungkinan (likelihood), yang kemudian digabungkan menjadi skor total risiko.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kategori risiko yang masuk dalam klasifikasi Very High Risk, karena memiliki kombinasi dampak dan kemungkinan yang tinggi. Risiko tersebut antara lain IT investment decision, portfolio definition and maintenance serta IT risk management. Masing-masing memperoleh skor total 18, yang merupakan skor tertinggi dalam analisis ini. Hal ini menandakan bahwa keputusan investasi TI dan pengelolaan risiko TI merupakan tantangan utama yang sangat memengaruhi kinerja organisasi.

Selain itu, IT project and program management serta IT compliance juga memiliki skor cukup tinggi, yaitu 16 dan 14, dan tergolong ke dalam kategori High

Risk. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan proyek-proyek TI dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi area yang rentan terhadap gangguan dan perlu mendapatkan perhatian serius dari manajemen.

Sejumlah risiko lain berada pada kategori Medium Risk, seperti Enterprise architecture, Logical & physical information security, Software failures, dan Third-party service delivery. Meskipun tidak setinggi kategori sebelumnya, risiko-risiko ini tetap berpotensi mengganggu operasional apabila tidak ditangani secara efektif. Beberapa risiko lain tergolong Low Risk, antara lain Environmental, Geopolitical, dan Tech industry-based innovation. Walaupun demikian, risiko-risiko ini tetap perlu dimonitor secara berkala agar tidak berkembang menjadi ancaman yang lebih besar.

Secara keseluruhan, hasil Design Factor 3 menunjukkan bahwa organisasi menghadapi tekanan terbesar pada aspek pengambilan keputusan investasi TI, pengelolaan risiko, serta pelaksanaan proyek dan kepatuhan. Oleh karena itu, tata kelola TI yang akan dirancang harus mampu memperkuat kapasitas manajemen risiko, meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan, serta memastikan keberhasilan implementasi proyek TI. Strategi mitigasi risiko harus menjadi bagian integral dalam perencanaan dan pengelolaan teknologi informasi organisasi.

D. Penjelasan Hasil Design Factor IT Related Issues - 04

Analisis Design Factor 4 berfokus pada isu-isu utama terkait teknologi informasi yang dihadapi oleh organisasi. Penilaian ini mencakup berbagai tantangan TI yang dinilai dari segi relevansi dan urgensinya, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai area yang perlu menjadi perhatian utama dalam tata kelola teknologi informasi.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa isu TI yang memperoleh tingkat kepentingan tinggi. Isu yang paling menonjol adalah dukungan TI terhadap produktivitas staf serta pemenuhan kebutuhan regulasi dan kepatuhan eksternal. Kedua isu ini dinilai sangat penting karena berdampak langsung pada

efisiensi operasional organisasi dan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Kegagalan dalam mengatasi isu ini dapat berakibat pada turunnya kinerja sekaligus meningkatnya risiko hukum dan reputasi.

Selain itu, isu lain yang juga cukup signifikan adalah keamanan informasi dan perlindungan data, pengendalian biaya TI, serta dukungan TI terhadap inovasi dan transformasi bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi tidak hanya fokus pada kepatuhan dan efisiensi, tetapi juga menaruh perhatian pada keamanan serta pemanfaatan TI sebagai enabler inovasi.

Sejumlah isu lain, seperti keterandalan sistem aplikasi, resiliensi infrastruktur, dan dukungan TI terhadap kepuasan pelanggan, berada pada tingkat kepentingan sedang. Artinya, isu-isu tersebut tetap relevan, namun bukan prioritas utama jika dibandingkan dengan isu kepatuhan, produktivitas, dan keamanan. Sementara itu, terdapat pula isu-isu dengan tingkat kepentingan relatif rendah, misalnya isu lingkungan eksternal TI atau perubahan teknologi yang cepat. Walaupun demikian, isu ini tetap harus dimonitor agar tidak menimbulkan potensi gangguan di masa depan.

Secara keseluruhan, hasil Design Factor 4 menegaskan bahwa organisasi menghadapi tekanan yang cukup besar pada aspek kepatuhan regulasi, peningkatan produktivitas, dan keamanan informasi. Oleh karena itu, tata kelola TI yang akan diterapkan harus mampu mendukung efisiensi operasional, menjamin kepatuhan hukum, serta memperkuat keamanan data dan informasi. Pada saat yang sama, TI juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk mendorong inovasi dan mendukung transformasi bisnis organisasi.

E. Penjelasan Hasil Design Factor Threat Landscape – 05

Berdasarkan hasil analisis pada Design Factor 05 (Threat Landscape), dapat diketahui bahwa kondisi lanskap ancaman yang dihadapi organisasi terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu tinggi (high) sebesar 55% dan normal sebesar 45%. Proporsi ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah ancaman yang dihadapi organisasi termasuk ke dalam kategori dengan tingkat risiko tinggi,

sehingga menuntut adanya perhatian khusus dalam penerapan tata kelola dan manajemen keamanan informasi.

Ancaman dengan tingkat high (55%) mencerminkan adanya potensi risiko signifikan yang dapat mengganggu kelangsungan operasional organisasi, baik dari sisi serangan siber, kebocoran data, maupun ancaman internal seperti human error atau penyalahgunaan sistem. Persentase yang cukup tinggi ini menandakan bahwa organisasi harus memprioritaskan strategi mitigasi risiko, termasuk penguatan sistem keamanan, penerapan kontrol akses yang lebih ketat, serta peningkatan kesadaran keamanan siber pada seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, ancaman dengan kategori normal (45%) menunjukkan bahwa hampir setengah dari lanskap ancaman masih berada pada tingkat yang dapat dikelola dengan mekanisme kontrol yang sudah ada. Meskipun demikian, kondisi ini tetap memerlukan monitoring secara berkala agar tidak berkembang menjadi ancaman dengan tingkat risiko yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, hasil DF05 ini menegaskan bahwa organisasi beroperasi dalam lingkungan ancaman yang cukup kompleks dengan dominasi ancaman berlevel tinggi. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan kapabilitas tata kelola TI, khususnya pada aspek manajemen risiko, deteksi dini ancaman, serta respon insiden. Hal ini selaras dengan kerangka kerja COBIT 2019 yang menekankan pentingnya menyesuaikan tata kelola TI dengan dinamika ancaman eksternal dan internal untuk menjaga keberlangsungan bisnis serta mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi.

F. Penjelasan Hasil Design Factor Compliance Requirements – 06

Berdasarkan hasil analisis Design Factor 6 (DF6) – Compliance Requirements, terlihat bahwa tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan standar eksternal maupun internal dipandang memiliki tingkat kepentingan yang seimbang antara kategori tinggi dan normal, masing-masing sebesar 50%. Sementara itu, kategori rendah menunjukkan nilai 0%, yang berarti aspek

kepatuhan tidak pernah dianggap tidak penting dalam konteks tata kelola TI organisasi.

Ini menunjukkan bahwa organisasi berada pada posisi strategis dalam memastikan tata kelola teknologi informasi selalu sejalan dengan regulasi, standar industri, maupun kebijakan internal yang berlaku. Proporsi yang sama antara kategori tinggi dan normal dapat diartikan bahwa sebagian besar area dalam tata kelola menuntut pemenuhan kepatuhan secara ketat, namun terdapat juga beberapa area yang dapat dikelola dengan tingkat fleksibilitas yang lebih moderat. Implikasinya, organisasi perlu menjaga keseimbangan antara kepatuhan yang ketat (*strict compliance*) dengan fleksibilitas operasional. Di satu sisi, regulasi yang dianggap kritical, seperti keamanan data, perlindungan privasi, serta standar audit, harus dipatuhi dengan ketat karena berhubungan langsung dengan risiko hukum dan reputasi organisasi. Di sisi lain, beberapa persyaratan yang masuk kategori normal tetap perlu diperhatikan, meskipun implementasinya dapat dilakukan secara lebih adaptif sesuai kebutuhan operasional organisasi.

Dengan demikian, hasil DF6 ini menegaskan bahwa faktor kepatuhan merupakan elemen fundamental dalam tata kelola TI organisasi. Proporsi kepentingan yang seimbang memberikan sinyal bahwa organisasi telah menempatkan aspek *compliance* tidak hanya sebagai kewajiban administratif, melainkan juga sebagai bagian integral dari strategi tata kelola dan manajemen risiko. Hal ini sejalan dengan kerangka kerja COBIT 2019 yang menekankan pentingnya kepatuhan sebagai salah satu faktor desain utama dalam membangun sistem tata kelola TI yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

G. Penjelasan Hasil Design Factor Role of IT- 07

Berdasarkan hasil pengolahan data pada **Design Factor 7 (Role of IT)**, dapat diketahui bahwa peran Teknologi Informasi (TI) dalam organisasi memiliki tingkat kepentingan yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan strategis dan operasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa peran TI sebagai **Support**

memperoleh skor tertinggi, yaitu **5**, yang menandakan bahwa TI dipandang sangat penting dalam mendukung proses bisnis inti, efisiensi operasional, serta keberlangsungan aktivitas organisasi sehari-hari.

Selanjutnya, peran TI sebagai **Strategic** memperoleh skor **4**, yang berarti TI tidak hanya bertindak sebagai pendukung, tetapi juga berkontribusi dalam pengambilan keputusan jangka panjang dan perencanaan strategis organisasi. Hal ini menunjukkan adanya orientasi organisasi untuk memanfaatkan TI sebagai instrumen yang mampu meningkatkan daya saing serta mendukung inovasi.

Sementara itu, peran TI sebagai **Factory** dan **Turnaround** masing-masing memperoleh skor **3**. Nilai ini mengindikasikan bahwa meskipun TI berperan dalam memastikan kontinuitas layanan (Factory) dan mampu mendukung transformasi ketika organisasi menghadapi tantangan besar (Turnaround), peran tersebut belum menjadi prioritas utama dibandingkan peran Support dan Strategic.

Secara keseluruhan, temuan ini menggambarkan bahwa organisasi lebih menekankan fungsi TI sebagai pilar pendukung operasional serta penentu arah strategi bisnis. Oleh karena itu, tata kelola TI perlu difokuskan pada peningkatan kualitas layanan TI, optimalisasi proses pendukung, serta pemanfaatan TI dalam mendukung visi dan strategi organisasi di masa depan.

H. Penjelasan Hasil Design Factor Sourcing Model for IT- 08

Hasil analisis Design Factor 8 mengenai *Sourcing Model for IT* menunjukkan bahwa organisasi menempatkan porsi yang relatif berimbang antara tiga model pengelolaan teknologi informasi. Outsourcing dan insourced masing-masing memperoleh nilai 34 persen, sementara cloud memperoleh 32 persen. Hasil ini memberikan gambaran bahwa organisasi tidak hanya mengandalkan satu pendekatan tertentu, melainkan membagi peran sesuai kebutuhan dan karakteristik layanan yang dijalankan.

Porsi yang sama besar antara outsourcing dan insourced menandakan adanya kesadaran untuk menjaga keseimbangan antara kendali internal dan

pemanfaatan sumber daya eksternal. Outsourcing digunakan untuk memperoleh efisiensi biaya, percepatan implementasi, dan akses terhadap teknologi maupun tenaga ahli yang mungkin tidak tersedia di dalam organisasi. Sebaliknya, insourced dipertahankan untuk memastikan adanya kontrol penuh terhadap fungsi inti dan data yang bersifat strategis, sehingga keamanan serta kepatuhan tetap terjaga.

Sementara itu, porsi cloud yang hampir setara menunjukkan bahwa organisasi telah mengadopsi layanan berbasis awan untuk mendukung kebutuhan fleksibilitas, ketersediaan, dan skalabilitas infrastruktur. Hal ini juga mencerminkan kesiapan organisasi dalam mengikuti perkembangan teknologi digital tanpa harus terbebani oleh investasi infrastruktur fisik yang besar.

Secara keseluruhan, hasil dari DF08 menggambarkan pola pengambilan keputusan yang pragmatis, di mana setiap model sourcing memiliki peran penting sesuai konteksnya. Pendekatan kombinasi ini membantu organisasi dalam menjaga efisiensi operasional, memastikan keamanan, sekaligus mendukung inovasi berbasis teknologi yang relevan dengan kebutuhan bisnis.

I. Penjelasan Hasil Design Factor Implementation Methods - 09

Berdasarkan hasil pada Design Factor 9 (DF9): IT Implementation Methods, dapat dijelaskan bahwa organisasi memposisikan metode implementasi teknologi informasi dengan tiga pendekatan utama, yaitu Agile, DevOps, dan Traditional. Hasil analisis menunjukkan bahwa Agile dan Traditional memiliki tingkat kepentingan yang sama, masing-masing sebesar 39%, sementara DevOps memperoleh porsi sebesar 22%.

Dari distribusi tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi masih menyeimbangkan antara pendekatan modern (Agile) dengan pendekatan konvensional (Traditional). Hal ini menandakan bahwa organisasi berusaha menjaga fleksibilitas dalam pengembangan sistem, tetapi tetap mempertahankan metode tradisional untuk proyek-proyek tertentu yang membutuhkan struktur lebih ketat dan dokumentasi yang lengkap.

Sementara itu, penerapan DevOps yang hanya sebesar 22% menunjukkan bahwa organisasi belum sepenuhnya mengintegrasikan praktik kolaboratif antara pengembangan dan operasi TI. Padahal, DevOps berpotensi meningkatkan kecepatan, kualitas, dan keberlangsungan layanan TI. Oleh karena itu, rendahnya persentase ini mengindikasikan adanya ruang untuk perbaikan dalam hal otomatisasi, kolaborasi lintas fungsi, serta penerapan continuous delivery.

Secara keseluruhan, hasil DF9 ini menunjukkan bahwa organisasi berada pada tahap transisi, di mana metode Agile mulai mendapatkan tempat sebagai strategi utama, namun masih berjalan berdampingan dengan metode tradisional. Dengan meningkatkan penerapan DevOps, organisasi berpotensi memperoleh manfaat yang lebih besar berupa efisiensi proses, pengurangan risiko kegagalan implementasi, serta peningkatan responsivitas terhadap perubahan kebutuhan bisnis.

J. Penjelasan Hasil Design Factor Technology Adoption Strategy- 10

Berdasarkan kerangka kerja COBIT 2019, *Design Factor 10 - Technology Adoption Strategy* merupakan faktor penting yang memengaruhi rancangan sistem tata kelola teknologi informasi dalam organisasi. Faktor ini menilai sejauh mana organisasi bersikap proaktif atau reaktif dalam merespons perkembangan teknologi, yang kemudian akan berdampak langsung pada pengelolaan risiko, inovasi, dan pencapaian tujuan strategis.

Hasil analisis menunjukkan bahwa organisasi menempatkan strategi adopsi teknologi dengan kecenderungan terbesar pada posisi follower (55%). Posisi ini sesuai dengan strategi adopsi yang menekankan pada aspek kehati-hatian, di mana organisasi memilih untuk mengimplementasikan teknologi baru setelah teknologi tersebut terbukti stabil, efektif, dan memiliki tingkat keberhasilan tinggi di lingkungan eksternal. Menurut prinsip COBIT 2019, hal ini mendukung praktik tata kelola yang lebih terkendali karena memungkinkan manajemen risiko yang lebih baik serta meminimalkan potensi kerugian akibat kegagalan teknologi.

Selanjutnya, terdapat 35% pada kategori *slow adopter*, yang menunjukkan bahwa dalam beberapa kondisi organisasi bahkan lebih memilih untuk menunda adopsi teknologi hingga benar-benar dibutuhkan atau hingga ada dorongan signifikan dari faktor eksternal. Strategi ini memperkuat orientasi organisasi pada efisiensi dan pengendalian biaya, tetapi di sisi lain berisiko menimbulkan *lag* inovasi apabila perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat.

Sementara itu, hanya 25% yang berada pada kategori *first mover*. Angka ini mengindikasikan bahwa organisasi jarang mengambil posisi sebagai pelopor adopsi teknologi baru. Dari perspektif COBIT 2019, rendahnya adopsi sebagai *first mover* dapat mengurangi peluang organisasi untuk memperoleh keunggulan kompetitif melalui inovasi disruptif, karena lebih cenderung fokus pada stabilitas ketimbang kecepatan beradaptasi.

Dengan demikian, hasil dari DF10 ini memperlihatkan bahwa strategi adopsi teknologi organisasi lebih bersifat adaptif dan reaktif dibandingkan proaktif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip COBIT 2019 yang menekankan keseimbangan antara pencapaian nilai (*value delivery*) dan manajemen risiko (*risk optimization*). Namun, organisasi perlu mempertimbangkan adanya porsi inovasi yang lebih tinggi agar tidak tertinggal dalam menghadapi percepatan transformasi digital di masa depan.

Dalam era digital saat ini, tata kelola Teknologi Informasi (TI) menjadi aspek penting dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, khususnya di sektor publik. Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan TI, diperlukan kerangka kerja yang terstandarisasi, seperti COBIT 2019. Salah satu domain penting dalam kerangka ini adalah **BAI09 (Manage Assets)**, yang berfokus pada pengelolaan aset TI agar dapat memberikan nilai maksimal bagi organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran *Capability Levels* pada domain BAI09 yang ditampilkan pada tabel 1.1, diperoleh nilai capability sebesar **3** dari total nilai aktivitas 96 terhadap 34 aktivitas yang diukur dari responden bernama **Dwi**

Kelana Putra S.E. Nilai ini mengindikasikan bahwa organisasi telah berada pada **Level 3 (Established Process)**, yang berarti proses sudah terdokumentasi, distandarisasi, dan dikomunikasikan secara baik kepada seluruh pihak yang berkepentingan.

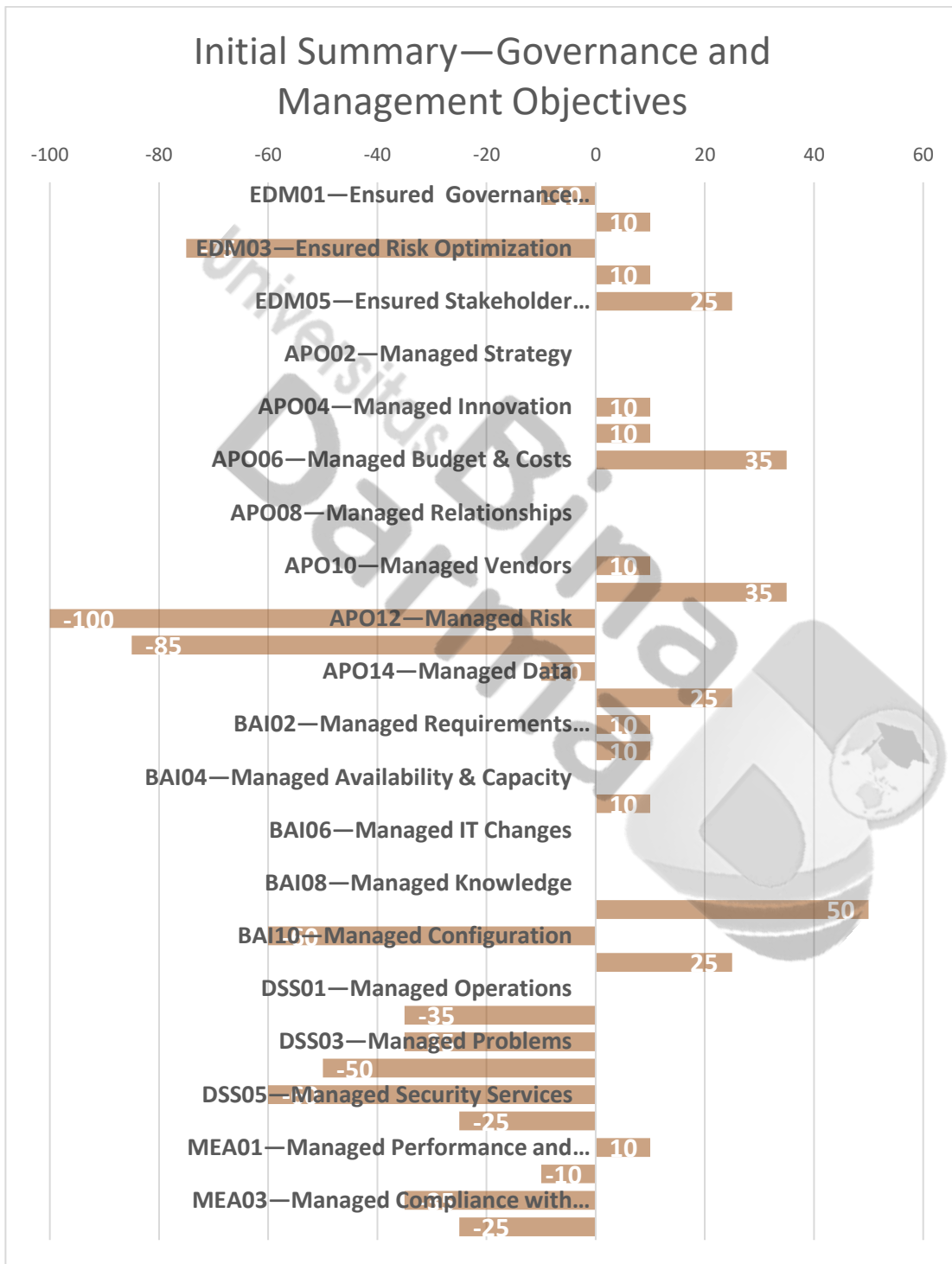
Namun demikian, capaian ini juga menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan ke level yang lebih tinggi, seperti Level 4 (Predictable Process) atau Level 5 (Optimizing Process), agar pengelolaan aset TI dapat dilakukan secara lebih proaktif dan berkelanjutan. Dengan kata lain, meskipun proses telah berjalan sesuai standar, organisasi masih perlu memperkuat aspek prediktif dan inovatif dalam pengelolaan aset TI. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana kapabilitas organisasi dalam menerapkan domain BAI09 serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang relevan agar tata kelola aset TI dapat memberikan nilai tambah yang optimal bagi organisasi.

Capaian **Level 3 (Established Process)** dalam pengukuran *Capability Levels* pada domain BAI09 menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki proses yang terdokumentasi dengan baik dan telah distandarkan dalam pengelolaan aset TI. Ini menjadi indikasi bahwa organisasi tidak hanya menjalankan aktivitas secara ad-hoc, tetapi telah menerapkan prosedur yang konsisten dan dapat diulang. Dokumentasi proses ini juga memungkinkan adanya akuntabilitas serta kemudahan dalam pelatihan dan pengawasan operasional.

Namun, capaian ini belum mencerminkan bahwa organisasi telah mampu **memprediksi, mengukur performa, maupun melakukan optimalisasi terhadap pengelolaan aset secara berkelanjutan**, sebagaimana yang menjadi ciri utama dari Level 4 dan Level 5 dalam kerangka COBIT 2019. Artinya, meskipun sudah cukup baik, masih terdapat peluang untuk peningkatan agar proses pengelolaan aset lebih **terukur (predictable)** dan **berorientasi pada perbaikan berkelanjutan (continuous improvement)**.

Selain itu, hasil tersebut juga mencerminkan adanya kebutuhan akan integrasi yang lebih kuat antara proses manajemen aset dengan proses lain yang saling mendukung, seperti **manajemen risiko, manajemen layanan, dan manajemen perubahan**. Dalam praktiknya, pengelolaan aset yang tidak terintegrasi akan berdampak pada ketidakefisienan penggunaan sumber daya, meningkatnya biaya operasional, serta potensi kehilangan nilai dari aset-aset TI yang dimiliki organisasi. Dengan mempertimbangkan pentingnya peran aset TI dalam mendukung operasional dan layanan publik, maka evaluasi terhadap penerapan domain BAI09 menjadi sangat krusial. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui tingkat kapabilitas saat ini, tetapi juga menjadi dasar dalam **menyusun strategi peningkatan tata kelola aset TI** yang sesuai dengan arah pengembangan organisasi secara menyeluruh.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam bentuk **analisis mendalam terhadap implementasi domain BAI09** serta menyajikan **rekomendasi perbaikan yang spesifik dan terukur**, sehingga organisasi dapat terus meningkatkan kapabilitasnya dalam mengelola aset TI secara efektif, efisien, dan selaras dengan tujuan strategis organisasi.



Gambar 1.1 Domain Cobit Yang Memiliki Angka Kritis

Studi Kelayakan Implementasi Pengelolaan Aset TI Berdasarkan COBIT 2019 BAI09

a. Kelayakan Teknis (Technical Feasibility)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan saat ini memiliki infrastruktur TI yang cukup, mencakup perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), serta jaringan internal. Namun, belum terdapat sistem terintegrasi untuk mendata, memantau, dan mengelola aset secara otomatis. Dengan adanya kerangka kerja COBIT 2019 domain BAI09, pemanfaatan teknologi dapat ditingkatkan untuk mendukung manajemen aset secara lebih sistematis dan efisien. Secara teknis, pelaksanaan sistem pengelolaan aset berbasis COBIT 2019 memungkinkan dilakukan dengan dukungan infrastruktur yang tersedia, meskipun perlu penyesuaian perangkat dan pelatihan staf.

b. Kelayakan Ekonomis (Economic Feasibility)

Penerapan sistem pengelolaan aset TI yang baik dapat meminimalkan pemborosan, mendeteksi perangkat tidak aktif, dan menghindari pembelian perangkat ganda. Hal ini akan berdampak pada efisiensi anggaran tahunan dalam jangka panjang. Investasi awal dalam sistem pengelolaan aset dan pelatihan SDM sebanding dengan penghematan biaya pemeliharaan, lisensi software, dan risiko kehilangan aset di masa depan.

c. Kelayakan Operasional (Operational Feasibility)

Hasil wawancara menunjukkan adanya kesadaran di internal Disnakertrans mengenai pentingnya tata kelola aset TI. Namun, saat ini proses masih dilakukan manual dan tidak terdokumentasi dengan baik. Dengan panduan domain BAI09, operasional manajemen aset dapat ditingkatkan dengan prosedur yang terstandarisasi, mulai dari pengadaan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset. Implementasi domain BAI09 sangat memungkinkan secara operasional karena

sejalan dengan kebutuhan organisasi dan keinginan untuk meningkatkan efisiensi layanan.

d. Kelayakan Hukum dan Regulasi (Legal Feasibility)

Tidak ada regulasi yang menghambat penerapan sistem pengelolaan aset TI di instansi pemerintah, selama mematuhi aturan pengadaan barang/jasa dan perlindungan data. Justru, pengelolaan aset yang baik dapat membantu Disnakertrans memenuhi kewajiban audit internal dan eksternal. Kelayakan hukum terpenuhi dan penerapan sistem ini justru mendukung akuntabilitas dan transparansi publik.

e. Kelayakan Waktu (Schedule Feasibility)

Dengan perencanaan yang tepat, implementasi sistem manajemen aset berbasis COBIT 2019 dapat dilakukan dalam waktu 3–6 bulan, termasuk tahapan analisis kebutuhan, perancangan, pelatihan, dan penerapan. Implementasi dapat dilakukan dalam jangka waktu yang realistis dan efisien jika didukung oleh komitmen pimpinan dan tim pelaksana.

Berdasarkan analisis dari berbagai aspek di atas, implementasi pengelolaan aset TI berdasarkan COBIT 2019 domain BAI09 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan **layak untuk dilaksanakan**. Proyek ini mendukung peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan layanan publik melalui tata kelola aset TI yang lebih profesional dan terukur.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, Maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

Perumusan masalah ini disusun dalam 5 kategori utama yang saling berkaitan:

- A. Identifikasi Tingkat Kematangan** - Membahas pengukuran kondisi saat ini berdasarkan domain-domain COBIT 2019 (EDM, APO, BAI, DSS, dan MEA).

B. Analisis Kesenjangan - Mengidentifikasi gap antara kondisi aktual dengan yang diharapkan, serta prioritas area perbaikan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengevaluasi Tingkat Kematangan Tata Kelola TI Menggunakan kerangka kerja COBIT 2019 dan Memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan public pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat sebagai acuan dalam meningkatkan tata kelola Teknologi Informasi di Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan melalui penerapan COBIT 2019, dari mengidentifikasi kesenjangan dan kebutuhan organisasi berdasarkan faktor desain COBIT 2019, penelitian ini membantu merancang sistem tata kelola TI yang efektif, selaras dengan tujuan strategis, serta memperkuat aspek kepatuhan, efisiensi layanan, dan pengelolaan risiko.